**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka adalah Bab yang membahas tentang tinjauan mengenai teori-teori terhadap judul tulisan dan makalah yang ingin peneliti lakukan. juga digunakan untuk menelaah hasil penelitian yang kemudia teori dan hasil penelitian akan dijadikan sebagai landasan berpikir oleh penulis mengenai masalah dalam tulisan penelitan untuk menjelaskan sebuah variable bebas dan terikat yang terkait dengan penelitian.

**2.1 Literature Review**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber pustaka yang dapat mendukung proses analisis penelitan Berdasarkan penelitian dari Aglaya Snetkov yang berjudul **“Theories, methods and ‘practices of (de)securitization’ : The Israel-gulf countries case”14** menjelaskan bagaimana terdapat perbedaan pola pikir dalam menganalisis desekuritisasi, seperti yang Bezer Coskun sampaikan dalam meneliti desekuritisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari empat interpretasi yang mendefinisikan sebuah desekuritisasi yang dikemukakan Hansen. Pertama, desekuritisasi dilihat sebagai “a form of détente”. Artinya desekuritisasi mengimplikasikan “keluar secara perlahan dari wacana security sehingga memfasilitasi jalan perjanjian politik yang murni dan tidak militaristik atau keras”. Kedua, desekuritisasi dilihat sebagai penggantian. Artinya “kombinasi antara satu isu sekuritisasi dikeluarkan dari security dengan satu isu lainnya di sekuritisasi secara serentak”. Ketiga, desekuritisasi dilihat sebagai re-artikulasi. Artinya desekuritisasi menghapus sebuah isu yang di sekuritisasi dengan memberikan solusi politik terhadap ancaman, bahaya dan keluhan yang dipertanyakan. Dan yang keempat, desekuritisasi dilihat sebagai “a process of silencing”. Artinya desekuritisasi ketika sebuah isu menghilang atau gagal menjadi security.

Dari penelitian Snetkov, penelitian desekuritisasi melihat referent object berada pada negara seperti Dari penelitian Snetkov, penelitian desekuritisasi melihat referent object berada pada negara seperti Israel dan bagaimana dampaknya terhadap regional kawasan arab teluk. Pemilihan Snetkov terhadap isu tersebut menjadi panduan dalam menganalisis objek mana yang yang pada awalnya di-sekuritisasi hingga berakhr dengan proses desekuritisasi. Khusus pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan Negara arab teluk sebagai referent object untuk mengetahui kondisi yang membuat israel perlu untuk melakukan desekuritisasi.

Berdasarkan penelitian dari Itamar Rabinovich dengan karya ilmiahnya yang berjudul **Israel And The Changing Middle East 15**, Israel memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan keamanan nasionalnya di Timur Tengah meski hubungan perdagangan internasional masih terus terlaksana dengan negara tetangga. Disamping sama-sama menolak program nuklir Iran beserta upayanya menjadi hegemoni kawasan, Israel dan Arab Saudi beserta negara anggota Gulf Cooperation Council lainnya sama-sama berupaya untuk tetap membuka jembatan normalisasi antar negara. Penyebabnya karena negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama dengan Israel terkait peningkatan jihadis di kawasan Timur Tengah, dan waspada terhadap kebijakan luar negeri A.S. di Timur Tengah. Namun di bawah sistem kawasan yang berubah terus-menerus dan tidak stabil ini, di tambah peristiwa Arab Spring beberapa tahun belakangan, membuat kebijakan luar negeri Israel saat ini berada di bawah focus dilemma, antara meingkatkan kerjasama ekonomi di kawasan atau mengupayakan stabilitas keamanan kawasan.

Israel sudah memiliki perjanjian damai dengan Mesir dan Jordan. Kedua negara bahkan secara tidak langsung membeli gas alam dan tergantung pada persediaan air yang disediakan oleh Israel. Hal tersebut menuai kritik yang datang di dalam negeri kedua negara karena dianggap sebagai upaya normalisasi lewat kerjasama ekonomi dengan Israel dan adanya ancaman terlalu bergantung pada Israel dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya dalam negeri. Hubungan yang sama juga terjalin antara Israel dan Turki dimana kedua negara memiliki kerjasama ekonomi meski tidak memiliki hubungan diplomatik.

Namun pada penelitian Itamar Rabinovich, semakin dekatnya hubungan antara Israel dengan negara Teluk Arab masih belum bisa menjawab jika adanya indikasi normalisasi dengan Arab Saudi sebagai salah satu negara Teluk Arab tersebut. Hal ini dikarekanan Itamar lebih mencoba menjelaskan kepentingan Israel di negara Arab tanpa menspesifikan terhadap aktor Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian dari Oded Eran yang berjudul Normalization between Israel and Arab States : Is the Idea Still Viable?16, ide normalisasi pertama kali muncul di Timur Tengah secara formal lewat Perjanjian Damai 1979 antara Israel dengan Mesir. Meski perjanjian tersebut hanya melahirkan “perdamaian dingin” antara kedua belah pihak, perjanjian masih tetap merupakan poin referensi utama jika ingin mengkaji sejarah awal upaya normalisasi Timur Tengah. Situasi perdamaian dingin antara Mesir dan Yordania dengan Israel terus berlanjut dengan munculnya Konferensi Madrid 1991, Perjanjian Damai dengan Yordania 1994, dan Perjanjian Oslo. Selain menguatkan ide normalisasi, aktivitas- aktivitas Internasional ini juga mengangkat isu seperti air, lingkungan, kerjasama ekonomi, pengungsi, dan aturan bersenjata. Namun aktivitas-aktifitas cukup lambat dalam mendorong upaya normalisasi karena NATO dan Uni Eropa yang mengadopsi ide “perbedaan”. Yang dimaksud dengan “perbedaan” ini adalah diperbolehkannya tiap negara menjalin hubungan dengan kedua organisasi Internasional sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka tanpa membutuhkan progres paralel dengan rekan lainnya di Dialog Mediterania (Yordania, Mauritania, Israel, Maroko, Tunisia, Algeria, dan Mesir).

Oded Eran mencoba menjelaskan bagaimana proses normalisasi yang dilakukan oleh Mesir dan Yordania terhadap Israel. Namun ini masih belum menjelaskan normalisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Israel sebagai sebuah negara. Berdasarkan penelitian dari Gadi Hitman dengan Chen Kertcher yang dengan karya tulis yang berjudul The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict17, Arab Saudi dan Qatar membuat dua kebijakan dan dua model cara dalam merepresentasikan normalisasi dengan Israel meskipun masih membatasi bentuk diplomasi antara kedua negara dengan Israel. Bagi Arab Saudi, hubungan negara dengan Israel pada masa ini muncul terutama semenjak terjadinya Arab Spring di Timur Tengah. Meskipun tidak memiliki ikatan resmi dengan Israel, hubungan kedua negara memasuki babak “tidak ada kontak perselisihan langsung”. Keberadaan hubungan tersebut dibenarkan oleh pejabat resmi Arab Saudi terutama jika ingin mengadakan pertemuan dengan pihak Israel. Bagi Qatar, hubungan negara dengan Israel bermula di tahun 1996. Kekuasaan keluarga besar Khalid al-Thani di Qatar dari tahun 1995-2013 telah melahirkan kebijakan luar negeri yang kreatif yang mengakibatkan semakin meningkatnya hubungan negara dengan berbagai negara maupun NGO di Timur Tengah meskipun ada perselisihan antara pihak-pihak tersebut.

**2.2 Kerangka Teoritis**

**2.2.1 Hubungan Internasional**

Terciptanya suatu hubungan dengan Negara lain ataupun dengan suatu organisasi atau lembaga internasional tidak terlepas dari konteks hubungan internasional. Merupakan studi tentang beberapa actor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi Negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional, seperti birokrasi dan pemerintahan domestic serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Mochtar Mas’oed, 1994:28).

Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005 : 3-4). Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan yang menyebabkan studi hubungan internasional semakin kompleks. Kompleksistas hubungan internasional itu mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (Jack C. Plano 1999 : 115).

Robert H. Jackson dan Georg Sorensen menambahkan Studi HI merupakan studi tentang hubungan dan interaksi antarnegara, termasuk aktivitas-aktivitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah nasional, oragnisasi-organisasi internasional (IGO), organisasi-organisasi non pemerintah (NGO), dan perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) (Jackson & Sorensen, 2013).

Menurut Joseph Nye, ada beberapa cara untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, salah satunya melalui *soft power .* Soft Power adalah kapasitas yang dimiliki suatu actor (Negara) untuk membujuk pihak lain melakukan apa yang diinginkannnya tanpa menggunakan paksaan (coercion), ancaman (threats), atau sogokan (bribes). Instrumen *soft power* di antaranya mencakup penggunaan nilai-nilai budaya, dialog ideologis, upaya-upaya untuk mempengaruhi pihak lain dengan contoh yang baik, dan imbauan untuk menerima nilai-nilai kemanusiaan. Sarana yang dapat digunakan untuk menerapkan *soft power* adalah diplomasi, diseminasi informasi, analisis, propaganda, dan program-program budaya untuk tujuan-tujuan politik. (Nye, 2011)

Dalam kegiatan hubungan internasional, munculnya soft power sebagai salah satu bentuk power yang membawa konsukuensi pada pelaksaan diplomasi. Dalam diplomasi dewasa ini, soft power menjadi suatu alat utama yang disebut *soft diplomacy.* Diplomasi yang dijalankan oleh berbagai Negara lebih mengutamakan unsur *soft diplomacy* yang dimiliki oleh suatu Negara dan ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi di era globalisasi (Jemadu, 2008).

### 2.2.2 Neo Realisme

 Menurut pandangan kaum neorealisme, struktur dalam hubungan internasional memiliki peran penting yang dapat menjaga kestabilan kepentingan nasional setiap negara. Kaum neorealisme lebih bersikap objektif dan memandang dunia apa adanya bukan memandang dunia yang seharusnya dan sistem anarki merupakan tolak ukur perilaku yang selalu berpatokan pada kepentingan nasional. Sehingga, persaingan dalam suatu negara tetap menjadi domain utama yang tetap dipertahankan neorealis sebagai wujud untuk memenuhi kepentingan nasional (Mearsheimer, 2007). Menurut pandangan neorealisme juga percaya bahwa  strukturlah yang membentuk perilaku negara, karena struktur inilah yang menjadi *primary determinant of state-behaviors*, negara lain dan lingkungan di sekitar negara itulah yang akan membentuk perilaku negara (Kenneth Waltz dalam Jackson Sorensen, 1999).

 Berbicara tentang pemenuhan kepentingan nasional juga tidak bisa terlepas dari kerjasama internasional. Tetapi, akan sangat bertolak belakang jika dikaitkan dengan pandangan kaum neorealis. Mereka lebih bersifat pesimis dalam melihat kerja sama internasional karena sistem internasional yang bersifat anarki (Baldwin, 1993). Kerjasama menurut pandangan neorealis, difokuskan pada pencapaian kepentingan nasional dengan *power* setiap negara.  Sejak munculnya kaum realisme klaisk, kaum neorealisme sudah menganggap kerjasama internasional bukan lah hal utama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu sifat pesimis terhadap adanya suatu kerja sesama meskipun hal itu masih tetap saja dapat dilakukan dengan cara terbuka terhadap kerjasama internasional dimana negara harus bersedia untuk memberikan kedaulatannya kepada diplomasi kerjasama selama hal tersebut dapat menguntungkan masing-masing pihak yang bersangkutan (Burchil & Linklater, 2009).

  Menuju pada konteks keuntungan yang dianut oleh kaum neorealis tidak terlepas pada pandangan realisme yang beranggapan bahwa tujuan negara yang utama adalah untuk mencapai keuntungan yang mutlak. Tetapi terdapat sedikit perbedaan pada sistem kerjasama yang dianggap oleh kaum neorealis dapat diwujudkan akan tetapi tetap tidak terlepas dari rasa pesimistik terhadap hasil yang akan didapat. Konsep kerjasama yang diterapkan oleh kaum neorealis adalah konsep yang relatif / *relatif gains*. Hal tersebut berarti bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama akan mendapatkan keuntungan lebih daripada pihak lainnya sehingga keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak akan dirasa tidak sama rata atau relatif dari sudut pandang yang berbeda (Baldwin, 1993). Sedangkan konteks tujuan negara yang dianut oleh kaum neorealis merupakan suatu *survival*yang hanya membahas permasalahan isu-isu keamanan dan politik. Dari sudut pandang intensi dan kemampuan negara menuurt kaum neorealis, beranggapan bahwa negara dituntut untuk meningkatkan kapabilitas suatu negaranya untuk bertahan dalam kondisi yang anarki. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh situasi yang anarki yang mengharuskan suatu negara dapat bersaing dalam menjaga eksistensi kapabilitas negaranya (Baldwin, 1993). Oleh sebab itu, intensi suatu negara menurut pandangan kaum neorealis diasumsikan sebagai persaingan dalam mewujudkan kepentingan nasional (Burchill & Linklater, 2009). Neorealisme menganggap jika rezim beserta institusi dalam hubungan internasional yang dilatarbelakangi oleh sistem anarki, tidak terlalu memiliki peran yang cukup signifikan dikarenakan bahwa mereka percaya jika kedua aspek tersebut tidak mempunyai *power* yang dominan dalam hubungan negara (Burchill & Linklater, 2009).

### 2.2.3 Regionalisme

 Regionalisme dalam Hubungan Internasional memiliki berbagai macam definisi. Edward D. Mansfield1 dan Helen V. Milner2 membagi regionalisme menjadi dua jenis. Pertama, regionalisme yang berdasarkan kedekatan geografis yang dapat diartikan sebagai adanya koordinasi atau kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik oleh negara – negara yang secara geografis berdekatan. Kedua, berdasarkan faktor non-geografis yang dapat diartikan sebagai aktivitas government dan non-government Istilah “region” dan “regionalism” masih belum mempunyai definisi yang baku. Perdebatan masalah definisi tersebut muncul pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an. Regionalisme sering diartikan sebagai derajat kepaduan sosial (etnik, bahasa, agama, budaya, sejarah), ekonomi (perdagangan), politik (tipe rezim, ideologi), dan organisasional (institusi regional formal). Seperti yang dikatakan John Ravenhill dalam artikelnya “Regionalism”, Hurrell juga mengatakan bahwa tidak ada regionalisme yang terjadi secara alami. Semua kawasan merupakan sebuah konstruksi sosial sehingga tidak mudah untuk mendefinisikannya. Definisi setiap kawasan bisa berbeda tergantung konteks masalah dan pembentukannya.

Konsep regionalisme bisa dibedah dalam lima kategori, yaitu:

#### 2.2.3.1 Regionalisasi

Regionalisasi adalah pertumbuhan integrasi sosial di dalam suatu kawasan dan proses interaksi sosial dan ekonomi secara tidak langsung. Ada yang menyebutnya sebagai proses ekonomi yang berdampak kepada adanya ketergantungan di antara negara-negara dalam suatu kawasan yang “given”. Pemikir lama mengatakannya sebagai integrasi informal sedangkan pemikir kontemporer mengatakannya sebagai “soft regionalism”. Kata kunci dari regionalisasi adalah migrasi, pasar, jaringan sosial. Ketiga hal tersebut dapat meningkatkan interaksi yang mengikat negara-negara dan membentuk kawasan baru yang lintas batas.

2. Identitas dan kekhawatiran regional

Emmanuel Adler memberikan sebuah istilah “cognitive regions”. Menurutnya, kawasan itu seperti bangsa, merupakan komunitas yang diimajinasikan yang mempunyai wilayah tertentu dan mengabaikan yang lain. Jadi, ada persepsi tentang kepemilikan bersama terhadap sebuah komunitas berdasarkan faktor internal yaitu kesamaan budaya, sejarah, atau tradisi relijius dan faktor eksternal karena menganggap ada ancaman keamanan yang sama atau budaya dari luar kawasan.

3. Kerjasama antarnegara dalam satu kawasan

Aktivitas regionalisme antara lain mencakup negosiasi dan konstruksi kerjasama antarnegara atau antarpemerintahan atau rezim. Regionalisme bisa dijadikan sebagai cara merespon tantangan eksternal, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan nilai-nilai bersama, dan menyelesaikan masalah bersama.

4. Integrasi regional yang dipromosikan oleh negara

Peter Smith memberikan beberapa dimensi untuk menggambarkan integrasi regional ekonomi, yaitu *scope*(isu), *depth*(harmonisasi kebijakan), institusionalisasi, dan sentralisasi (otoritas efektif). Pada awalnya, integrasi berkonsentrasi pada eliminasi penghambat perdagangan dan pembentukan kemudahan mobilisasi barang, jasa, modal, dan manusia.

5. Kohesi regional

Kohesi regional merupakan kemungkinan yang dapat terjadi apabila keempat kategori sebelumnya bisa terpenuhi. Kohesi memiliki dua arti. Pertama, ketika suatu kawasan memainkan peran penting dalam hubungannya dengan negara atau dengan aktor lain. Kedua, ketika suatu kawasan membentuk basis yang terorganisasi untuk mengambil kebijakan dalam setiap isu.

Analisis teoritik untuk regionalisme yaitu:

1. Teori sistemik atau struktural

Terdapat dua teori sistemik yang signifikan. Pertama, teori neorealis yang menekankan kepada sistem internasional yang anarki dan pentingnya kompetisi kekuatan politik. Kedua, teori interdependensi struktural dan globalisasi yang menekankan kepada sistem internasional yang senantiasa berubah karakternya dan dampaknya terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

#### 2.2.3.2 Teori regionalisme dan interdependensi

Teori ini melihat ada keterkaitan antara regionalisme dan ketergantungan regional sebagai oposisi ketergantungan global. Terdapat tiga teori:

* Neofungsionalisme

Peningkatan level interdependensi yang tinggi akan menciptakan gerakan yang pelan tapi pasti kepada kerjasama yang mengarah pada integrasi politik. Institusi supranasional dilihat sebagai cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah bersama. Integrasi tersebut akan menimbulkan efek “spillover”. Pertama, *functional spillover* yaitu integrasi parsial di satu bidang dan meningkatnya kompleksitas kerjasama akan mendorong terjadinya kerjasama di bidang lain. Kedua, *political spillover* yaitu keberadaan institusi supranasional akan menciptakan kesadaran untuk memperkuat diri dalam *institutional building*.

* Neoliberal institusionalisme

Teori ini adalah teori yang paling masuk akal dan paling berpengaruh untuk menjelaskan kemunculan regionalisme. Analisisnya adalah semakin tinggi tingkat ketergantungan maka akan memicu kebutuhan akan adanya kerjasama internasional. Menurut Keohane, institusi dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk berbagai macam masalah kolektif. Namun demikian, teori ini dianggap statis karena hanya fokus kepada negara sebagai entitas yang egois yang bisa diajak bekerjasama. Bergabungnya suatu negara menjadi anggota institusi tertentu juga dianggap membawa keuntungan bagi negaranya. Walaupun kepentingan kolektif menjadi yang utama, namun selanjutnya akan tetap memberikan manfaat bagi kepentingan negara anggota.

* Konstruktivisme

Teori ini fokus kepada identitas dan kekhawatiran regional seperti yang sudah dijelaskan di atas, atau disebut juga dengan regionalisme kognitif.

3. Teori level domestik

Teori ini fokus kepada peranan pembagian atribut atau karakter domestik. Seperti Karl Deutsch, yang ditekankan adalah pentingnya kecocokan dan relevansi nilai terhadap pengambilan keputusan dalam komunitas keamanan di suatu kawasan.

Pada dasarnya, regionalisme muncul seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia dan negara. Ketika suatu negara membutuhkan keunggulan dan potensi negara lain, maka pada saat itu pula negara tersebut akan melihat kerjasama sebagai solusi yang memiliki proyeksi cerah. Regionalisme hanyalah suatu bentuk kerjasama dalam aspek kesamaan geografis, sejarah, budaya, dan lain sebagainya.

 Ada suatu perdebatan, apakah regionalisme itu anti globalisasi atau justru produk dari globalisasi? Regionalisme adalah produk dari globalisasi karena terbukti regionalisme semakin menemukan posisinya di era globalisasi saat ini, di mana perkembangan teknologi dan kompleksitas kebutuhan manusia semakin mendorong terciptanya integrasi. Sedangkan regionalisme adalah anti globalisasi karena mendorong adanya proteksionisme dan nasionalisme kawasan saja sehingga memarjinalkan bagian bumi yang lain. Namun, perlu kita ingat adanya suatu bentuk kekhilafahan sebelum runtuh pada tahun 1924. Bukankah itu juga merupakan regionalisme dalam bentuk lain Anggotanya tidak semua berada dalam satu kawasan. Kesamaan ideologilah yang menyatukan negara-negara itu. Padahal era tersebut belum diidentifikasi sebagai era globalisasi. Sepertinya perdebatannya masih akan berlanjut.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

 Berdasarkan tinjauan Pustaka dan kerangka teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, penulis dapat merumuskan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis haruslah menggambarkan hubungan antara dua konsep yang bersifat kausalitas. Hipotesis merupakan asumsi dasar dari suatu penelitian, jawaban sementara bagi rumusan masalah penelitian yang bersifat asumsial dan harus dilakukan pengujian untuk menguji kebenarannya. Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut:

**“Dengan adanya upaya normalisasi hubungan antra Israel dengan Negara Arab teluk yang didorong oleh Amerika Serikat maka akan menimbulkan pertentangan negara arab yang berdampak terhadap dinamika geopolitik di kawasan timur tengah ”**

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

**Tabel 2.1**

**Verifikasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritis)** | **Indikator****(Empiris)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| **Variabel bebas:****Dengan adanya upaya normalisasi hubungan antra Israel dengan Negara Arab teluk yang didorong oleh amerika serikat** | 1. Normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan upaya pendekatan Israel kepada Negara teluk
2. Peran amerika serikat dalam mendorong normalisasi Israel dengan Negara teluk
 | 1. Israel melakukan perjanjian perdamaian dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab dan membuka kerjasama dengan Negara arab lain

*https://dunia.tempo.co/read/israelsiapkan kerja-sama-ekonomidengan uni-emirat-arab/, diakses 2 September 2020. “Kecewa Kesepakatan Israel,**.*1. Kepentingan AS, UEA, dan Israel secara jelas telah melatarbelakangi disepakatinya normalisasi hubungan UEA dan Israel. Kepentingan AS terkait dengan rencana Trump yang sedang berusaha memenangkan kembali pilpres AS dan kebijakannya di Timur Tengah

*https://www.thejakartapost.**com/news/2020/08/14/trumpsays-**to-host-mideast-dealsigning-**in-three-weeks.html/,**diakses 2 September 2020*. |
| **Variabel terikat:****menimbulkan pertentangan negara arab yang berdampak terhadap dinamika geopolitik di kawasan timur tengah**. | 1. Munculnya protes Negara arab lain mengenai isu palestina
2. Menjadi babak baru bagi kebijakan geopolitik Israel di timur tengah
 | 1. Normalisasi UEA dan Israel mendapat tentangan dari Negara regional karena berkaitan dengan isu palestina (Sumber: al jazeera).
2. Keberhasilan Israel melakukan normalisasi dianggap sebagai keberhasilan diplomasi Israel dan menjadi batu loncatan Israel menjalin relasi dengan Negara arab hal ini dinyatakan Netanyahu dalam laporan parlemen. (Sumber : Jerusalem post via : adam yezgel *)*
 |

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

**HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**NEGARA ARAB TELUK**

**ISRAEL**

**STUDI KAWASAN**

**UPAYA KERJASAMA DAN NORMALISASI**